

# ***CIVIC EDUCATION* DALAM PENDIDIKAN MORAL DI REPUBLIK RAKYAT CINA**

## **M A K A L A H**

Tugas Mata Kuliah:

**PERBANDINGAN *CIVIC EDUCATION* DI NEGARA BERKEMBANG**

Dosen Pengampu: Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A.

Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.



Oleh :

**SAMSURI**

**NIM. 0601498**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
KONSENTRASI KEWARGANEGARAAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
BANDUNG  
2007**

# **CIVIC EDUCATION DALAM PENDIDIKAN MORAL DI REPUBLIK RAKYAT CINA**

Oleh :

Samsuri

NIM. 0601498

Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

## **A. Pendahuluan**

Tidak ada sebutan khusus “pendidikan kewarganegaraan” (*civic education*) di Republik rakyat Cina (RRC, selanjutnya disebut Cina). Pendidikan kewarganegaraan khas Cina terletak secara melekat (*inherent*) dalam bentuk pendidikan moral. Pendidikan moral selalu berkaitan erat dengan politik di Cina. Dalam amatan Wing On Lee dan Chi Hang Ho (2005: 413), istilah “pendidikan moral” (*daode jiaoyu*) disebut juga pendidikan politik (*sixiang jiaoyu*) atau pendidikan politik (*zhengzhi jiaoyu*) dan atau pendidikan ideopolitik, sehingga kualitas moral bagai dua sisi mata uang yaitu sama kualitasnya dengan kualitas ideomoral dan atau moral-ideopolitik (*sixiang zhengzhi suzhi*). Tiga istilah tersebut digunakan secara bertukaran dalam literatur pendidikan di Cina.

Secara etimologis di Cina pendidikan moral menjadi sesuatu yang esensial sebagai alat sosialisasi politik, untuk mentransmisikan nilai-nilai ideologi dan politik, tidak hanya kepada para siswa, tetapi juga kepada masyarakat luas (Lee dan Ho, 2005: 413). Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Cina (1988), *Notice on Reforming and Strengthening the Moral Education Work in Secondary and Primary Schools*, “moral education is ideological and political education. It plays an important role in upholding the socialist nature of the

school” (sebagaimana dikutip Lee dan Ho, 2005: 414). Dari dokumen tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan moral merupakan pendidikan ideologi dan politik secara bersamaan. Dengan demikian, perubahan politik mempengaruhi perkembangan pendidikan politik di Cina. Hal serupa juga berarti bahwa pendidikan moral mencerminkan perubahan politik (Lee dan Ho, 2005: 414).

Dalam artikel ini, kajian pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di Cina akan memfokuskan diri kepada konteks pendidikan moral sebagai bentuk lain *civic education* di Cina. Selanjutnya, pembahasan akan mencakup kajian tentang landasan pengembangan pendidikan moral sebagai *civic education*, kurikulum dan bahan ajar pendidikan moral sebagai *civic education*, serta kultur kelas pendidikan moral sebagai *civic education* dan situs kewarganegaraan di Cina.

## **B. Konteks Pendidikan Moral sebagai *Civic Education* Model Cina**

Penjelasan Wing On Lee (2006:5) tentang karakteristik pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia dapat membantu pemahaman kita terhadap keberadaan pendidikan moral yang menjadi aspek pokok kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Cina. Sebagaimana dinyatakan oleh Kennedy dan Fairbothor (2004, dalam Lee, 2006: 5) bahwa pendidikan kewarganegaraan Asia ditandai oleh konsepsi-konsepsi keutamaan moral dan nilai-nilai personal.

Dalam kasus Cina, sebagaimana telah dipaparkan di muka, pendidikan kewarganegaraan merupakan kombinasi dari “*civic education, moral education, political education and ideological education*” ( Lee, 2006: 5). Meskipun istilah-istilah itu dapat dibedakan, namun secara konseptual sering saling dipertukarkan dalam penerapannya. Lee dan Zhong (dalam Lee, 2006; 5) telah mengidentifikasi suatu kontinum antara orientasi secara politik *civic education* dan orientasi secara politik pendidikan moral dalam perkembangan kurikulum

kewarganegaraan di Cina lebih dari 50 tahun yang lampau. Pendidikan kewarganegaraan di Cina setara (ekuivalen) dengan pendidikan ideologis dan politik pada tahun-tahun awal Pemerintahan Komunis Cina. Fokus pendidikan kewarganegaraan meningkat orientasinya kepada kualitas moral personal pada saat sekarang, meskipun elemen-elemen politik selalu hadir dalam sejarah pendidikan kewarganegaraan Cina. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral adalah suatu kontinum di Cina, di mana pada periode awal lebih pada pendidikan kewarganegaraan tetapi pada saat sekarang lebih kepada pendidikan moral, dan tidak ada waktu tanpa satu dengan lainnya (Lee, 2006: 5).

Dalam sistem pendidikan nasional Cina ada konsep *deyu*, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, *Deyu* memiliki pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. Arti ini lebih luas dikenal sebagai “macro-*deyu*”. Mikro-*deyu* berarti hanya pendidikan moral; sedangkan yang lainnya termasuk makro-*deyu* (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 449-450).

Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di Cina secara ringkas dapat dilihat kontinum perkembangannya sejak 1949 hingga sejak 1993. Pada **periode 1949-1978**, pendidikan moral berorientasi politik, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri kepada *Common Framework for Chinese People's Political Negotiations* Partai Komunis Cina. Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, mencintai buruh, mencintai ilmu, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam Lee dan Ho, 2005: 419).

Pada **periode 1978-1993**, secara gradual pendidikan moral menjadi independen dari politik. Pada Pleno Ketiga dari Kongres Nasional Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen “Behavioural Code for Primary and Secondary Students” (PRCMOE, 1979). Dari dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disiplin siswa; afektivitas terhadap tanah air sosialis dan kewirausahaan sosialis; dedikasi terhadap pembangunan Negara; haus ilmu pengetahuan baru; dan kemauan untuk berpikir dan keberanian untuk kreatif. Pada 1988, terdapat sebuah revisi radikal dalam kurikulum pendidikan politik. Di tingkat sekolah menengah pertama, mata pelajaran ‘Civics’ diperkenalkan di kelas 1 SMP (usia 12), ‘social history’ di kelas 2 SMP (usia 13), dan ‘construction of Chinese socialism’ di kelas 3 SMP (usia 14). Di tingkat sekolah menengah atas dikenalkan ‘scientific view of life’ untuk kelas 1 SMA (usia 15), ‘economics’ untuk kelas 2 SMA (usia 16), dan ‘politics’ di kelas 3 SMA. Pada 1988 pun dilahirkan satu dokumen lainnya, yaitu *Outline of Moral Education Secondary School* yang diterapkan secara penuh pada 1991. Arti penting dokumen ini ialah bahwa pendidikan moral tidak lagi diembel-embeli dengan kata ‘ideologi.’ Pendidikan moral mulai memfokuskan kepada kurikulum kewarganegaraan semata. Dokumen *Outline* itu mewajibkan pengajaran materi dan pendekatannya kepada aspek-aspek nilai, sikap dan perilaku (Lee dan Ho, 2005: 419-420). Fokus utama *Outline* mencakup:

- Sosialisme dan kolektivisme berdasarkan atas patriotisme
- Standar moral dan perilaku siswa, dan
- Adopsi sebuah pendekatan motivasional untuk mengembangkan kepercayaan diri (self-esteem), kemandirian (self-reliance), dan kekuatan diri siswa (Lee dan Ho, 2005: 420)

Pada 1993 dan 1994 Pemerintah Cina mengeluarkan dua dokumen penting yang merubah arah pendidikan moral. Dua dokumen itu ialah *Opinions on Strengthening and Improving the Party and Ideopolitical Works in Higher Institutes*

*in New Circumstances* dan *Opinions on Further Strengthening and Improving Moral Education Work in Schools* (Lee dan Ho, 2005: 420). Dokumen itu meluncurkan gagasan pendidikan “dua pelajaran”, yang berarti bahwa pendidikan politik didefinisikan sebagai satu kombinasi pelajaran teori Marxis dan pelajaran pendidikan ideopolitik. Perbedaan dua pelajaran itu di dalam pendidikan moral itu mengatur pemeliharaan pentingnya Marxisme dalam kurikulum sekolah, namun pada saat yang sama mencakup status resmi untuk pendidikan ideopolitik. Istilah ‘pendidikan ideopolitik’ lebih kepada ‘penanaman kualitas ideomoral.’ (Lee dan Ho, 2005: 420-421).

Pada **periode sejak 1993** terjadi depolitisasi pendidikan moral, yakni ditandai dengan penerimaan kebijakan ‘dua pelajaran’ sebagai demarkasi untuk pendidikan moral. Ini merupakan tanda pengakuan status independent dari pendidikan moral oleh Pemerintah Cina. Sejak meluncurkan modernisasi, maka pengajaran moralitas kewarganegaraan berorientasi kepada ekonomi pasar (Lee dan Ho, 2005: 421). Hasil yang dicapai dari periode ini ialah bahwa modernisasi dan keterbukaan Cina terhadap ekonomi pasar (kapitalisme global) menjadikan kurikulum pendidikan moral perlu mengembangkan diri sebagai pembebasan kurikulum kewarganegaraan yang berfokus kepada pertumbuhan individu dari sosialisasi politik (Lee dan Ho, 2005: 421).

### **C. Landasan Pengembangan Pendidikan Moral sebagai *Civic Education* Model Cina**

Pengembangan pendidikan moral sebagai bentuk khas *civic education* di Cina, didasarkan kepada sejumlah dokumen-dokumen Partai Komunis Cina (PKC) dan dan Pemerintah Cina itu sendiri. Antara PKC dan Pemerintah Cina itu sendiri adalah dua sisi sebuah mata uang. PKC dengan Polit Biro-nya merupakan lembaga yang menentukan jalannya pemerintahan di Cina. Dengan

demikian pendidikan moral yang dilaksanakan di Cina merupakan produk kebijakan lembaga tersebut, yang tentu saja nilai-nilai moral dasarnya mendasarkan diri pada asas dan cita-cita partai yang mendasarkan diri pada Marxisme-Leninisme, ajaran Ketua Mao Zedong, Pikiran Deng Xiaping dan nasionalisme Cina itu sendiri (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 459).

Reformasi pendidikan moral oleh PKC dan Pemerintah Cina pada periode sejak 1993 antara lain *Proposals for reinforcing and improving primary and secondary school Deyu* (CPC & State Council (CPC&SC), 2000); *Program for improving civic morality* (CPC, 2001); *Proposals for improving the ethical, ideological and moral standards of children and young people across the country* (CPC&SC, 2004), *Implementation outlines to carry forward and cultivate the national spirit in primary and secondary schools* (CPC&PRC Ministry of Education (MOE), 2004); dan *Rules for primary and secondary students* (PRCMOE, 2004) (dalam Qi Wanxue and Tang Hanwei, 2004: 465-480). Dokumen-dokumen itulah yang sekarang menjadi dasar pengembangan dan pelaksanaan pendidikan moral di Cina.

#### **D. Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Moral sebagai Civic Education Model Cina**

Pendidikan nasional Cina memiliki tujuan-tujuan untuk:

- *to understand through local changes the great changes brought about in China by the reform and opening up policy and socialist market economy led by the CPC, and to understand that Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory and 'the important thought of The Three Represents' are the guiding ideology in building socialism with Chinese characteristics;*
- *to understand the Party's basic line on the primary stage of socialism, the country's basic economic and political system at the present stage, and the superiority of the socialist system in producing social wealth and benefiting the people;*

- *to understand the objectives of building a well-off society in an all-round way and unbalanced social development so as to strengthen the mission sense of building socialist China;*
- *to understand the country's achievements in science, technology and educational development, to know about the gap between China and developed countries, to understand the realistic meaning of implementing the strategy of promoting the progress of the country with science and technology;*
- *to know the conditions of the population, resources and environment, to understand the policies of family planning, environmental protection, rational utilization of resources, and to establish long-lasting sustainable development; to understand that the development of such a united multiethnic country depends on all the people's solidarity, cooperation, hard work and common development, and to learn about the fine tradition of the Chinese nation and carry forward and cultivate the national spirit by one's own deeds, so as to promote socialist spiritual civilization and safeguard national steadiness and ethnic solidarity;*
- *to understand the developmental trend of the contemporary world, to know the status and function of China in the world, to know the opportunities and challenges facing China, to learn survival skills, to establish global concepts, to maintain world peace;*
- *to understand the common ideal for all Chinese nationalities and try to work hard in one's career and make a contribution to society ( sebagaimana dikutip Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 523).*

Sementara itu, derivasi tujuan pendidikan nasional Cina dalam kurikulum pendidikan moral adalah bertujuan untuk:

- *enhance their moral dispositions;*
- *help them form healthy psychological traits;*
- *initiate their legal awareness;*
- *strengthen their sense of social responsibility and behaviour;*
- *assist them in the pursuit of higher ideological and ethical standards, over and above observing the basic code of conduct;*
- *and guide them in carrying forward the national spirit and fostering a common ideal for socialism with Chinese characteristics (dalam Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519)*

Secara historis, keberadaan pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di sekolah-sekolah Cina dapat ditelusuri pada saat pendirian



Republik Rakyat Cina 1949. Kecenderungan-kecenderungan kurikulum lebih mengacu pada sejarah untuk reformasi kurikulum sekarang. Materi kurikulum pendidikan moral di sekolah tidak lengkap, terlalu abstrak dan terlepas dari kehidupan sosial, serta bentuk pedagoginya menekan inisiatif, kreativitas dan kompetensi siswa, serta bentuk evaluasi (penilaiannya) menekankan kepada aspek kognitif terhadap apa yang diajarkan sebagai mata pelajaran akademik (academic subject). Menanggapi kenyataan kelemahan pendidikan moral semacam itu, maka dilakukan reformasi pendidikan yang berorientasi mutu di Cina dalam pendidikan moral. Pada 1992 dibentuk kurikulum Ideologi dan Politik yang diterapkan di sekolah menengah pertama hingga 2003, dengan dua revisi utama selama waktu itu untuk mengakomodasi intensifikasi proses pembaharuan dan keterbukaan ('reform and opening up' process), perubahan-perubahan di masyarakat dan perbaikan-perbaikan di tingkat-tingkat kognitif siswa (Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 512). Tujuan reformasi kurikulum tersebut adalah untuk pengembangan orientasi perasaan, sikap dan nilai; pengembangan kompetensi moral; dan, pengembangan pengetahuan moral (Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519-20)

Perkembangan reformasi kurikulum pendidikan moral di Cina antara lain dapat dicontohkan dalam tingkat sekolah menengah pertama antara 1977-1992 pada Tabel 1. Pada bagian lain, di Tabel 2, dapat dicermati bagaimana hubungan antara tahap-tahap perkembangan sosial dan tujuan serta isi materi mata pelajaran Ideologi dan Moralitas di sekolah menengah pertama.

Hasil dari reformasi kurikulum pendidikan moral salah satunya adalah berhasil dikembangkan buku-buku teks pendidikan moral mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat *College*. Kumpulan buku teks itu, atau biasa dikenal sebagai *The Experimental Moral Education Textbooks Series*, menjadi proyek nasional yang penting dari *Educational Scientific Tenth Five-year Plan*, yang

dinamai dengan *Experiment-Based Research on Constructing a Whole Moral Education System to Popularize Systematic Achievements of Research and Experiment*. Buku-buku teks itu dikembangkan oleh sebuah tim *Moral Education Textbooks for College's* yang diketuai oleh Zhan Wansheng, yang kemudian *Director of the Moral Education Centre* (sekarang *Director of the Research Department for School Education*) dari *China National Institute for Educational Research* (CNIER). *The Experimental Moral Education Textbooks Series* terdiri atas 22 buku teks untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, sekolah kejuruan pertama dan *colleges*. Masing-masing-masing buku teks itu ialah:

*Moral Education Textbooks for Primary Schools (Grade One to Grade Six)*  
*Moral Education Textbooks for Junior High Schools (Grade Seven to Grade Nine)*  
*Moral Education Textbooks for Senior High Schools (Grade Ten to Grade Twelve)*  
*Moral Education Textbooks for Secondary Vocational Schools (Grade One to Grade Three)*  
*Moral Education Textbooks for Secondary Normal Schools (Teachers' College) (Grade One to Grade Three)* (dalam An Yunfeng, 2004: 626)

**Tabel 1. Kurikulum Pendidikan Moral di Sekolah Menengah Pertama Cina 1977-1992**

	Grade One Age 12-13	Grade Two Age 13-14	Grade Three Age 14-15
1977-79	Brief History of Social Development	Scientific Socialism	
1980-85	Youth and Adolescent Development	Brief History of Social Development	Legal Knowledge
1986-92	Citizenship Brief History of Social	Development Knowledge of Building	Socialism in China
1992	Ideology and Politics for Junior High School (Mental Health)	Ideology and Politics for Junior High School (Legal Knowledge)	Ideology and Politics for Junior High School (Brief History of Social Development and National Conditions)

(Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004:513)

**Tabel 2. Hubungan antara tahap-tahap perkembangan sosial dan tujuan serta isi materi mata pelajaran Ideologi dan Moralitas di sekolah menengah pertama.**

	Mental Health	Morality	Law	National Conditions
Growing Self	Knowing	Self-esteem and Self-encouragement	Legal Learning and Application	Cultural Identity/ Commitment to Chinese Culture
Relations between Self and Others	Communication and Understanding	Morality in Com-munication	Rights and Obligations	Common Ideals
Relations between Self, Collective, State and Society	Positive Attitudes towards Social Development and Progress	Responsibility to the Motherland, Society and Natural Environment	Law and Social Order	Understand National Conditions and Love China

(PRC MOE, 2003, dalam Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519)

Buku-buku teks ini bertujuan untuk mendukung reformasi kurikulum pendidikan moral sebagai penerapan praktek pendidikan moral yang baru di semua jenis sekolah. Buku-buku teks mewakili eksplorasi rintisan untuk pembaharuan (reformasi) kurikulum Ideologi dan Moralitas dan memberikan materi-materi pokok dan dasar untuk pembentukan panduan-panduan kurikulum *Ideology and Moralitas*. Panduan-panduan kurikulum yang baru itu telah dibentuk oleh Menteri Pendidikan, untuk *Moral Character and Life* (PRCMOE, 2002a) dan untuk *Moral Character and Society* (PRCMOE, 2002b) di sekolah dasar, dan untuk *Ideology and Morality* (PRCMOE, 2003) di sekolah menengah pertama, yang memuat beberapa tujuan, materi, dan metode pendidikan moral sama sebagai garis besar bahan-bahan pengajaran (An Yunfeng, 2004: 626).

*The Experimental Moral Education Textbook Series* didasarkan kepada sebuah elaborasi desain dan penyusunan menurut teori pendidikan moral dan materi yang berkaitan dengan praktek dan penerapannya (implementasi). Dengan demikian, menurut An Yunfeng (2004: 625-629), buku-buku teks itu memiliki ciri:

*....First, the textbooks embody an approach which combines awareness, feeling, will and behaviour. ...Secondly, the textbooks embody the approach of 'back to life', by combining theory with practice. ...Thirdly, the textbooks have introduced a research-oriented study method for the students.*

#### **E. Kultur Kelas *Civic Education* dan Situs Kewarganegaraan di Cina**

Dari paparan sebelumnya dapat diperoleh gambaran bagaimana sebenarnya *civic education* di Cina, yang tidak lain merupakan bagian dari pendidikan moral. Dengan demikian, jelas terbayang bagaimana karakteristik

*civic education* di Cina yang sarat dengan visi ideologi politik Partai Komunis Cina, yakni Marxisme-Leninisme, Ajaran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping.

Menurut Zhu Xiaoman dan Liu Cilin (2004) secara umum ada dua pendekatan pengajaran moral di sekolah-sekolah Cina. Pertama, pendekatan pengajaran dengan berbasis mata pelajaran (*Subject-based moral education*). Pendekatan ini menjadi mata pelajaran Pendidikan Moral tersendiri, di mana guru-guru khusus mengajar tentang ideologi, politik, hukum, moralitas dan kesehatan mental, sebagaimana kurikulum mata pelajaran lainnya (seperti Bahasa Cina, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah dan seterusnya).

Kedua, pendekatan pengajaran melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler *Extra-curricular activities*. Kegiatan ekstra-kurikuler ini dilakukan dalam bentuk seperti *morning meeting*, *class meeting*, atau kegiatan-kegiatan Partai, *Youth League* (Liga Pemuda, semacam KNPI di Indonesia) dan *Young Pioneers* (Pemuda Pelopor). Kegiatan ekstrakurikuler ini direncanakan, dirancang, dikoordinasikan dan diawasi oleh organisasi-organisasi di bawah Partai Komunis Cina, *Youth League* (Liga Pemuda) dan *Young Pioneers* (Pemuda Pelopor) sama seperti, *as well as the Office of Moral Education* dan guru-guru kelas (Xiaoman dan Cilin, 2004 481-494).

Dapat dimengerti jika baik dalam pendekatan pertama maupun pendekatan kedua, model pendidikan yang dikembangkan bersifat indoktrinatif dan sarat ideologi partai penguasa. Sikap-sikap kritis sangat tertutup untuk dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan di bawah sistem politik otoriter. Namun, dari kedua pendekatan itu, ada situs-situs kewarganegaraan yang dapat menjadi media warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya yakni melalui Partai dan organisasi kepemudaan partai. Organisasi-organisasi ini nampak berperan penting dalam membangun kultur politik dari model pendidikan moral yang memuat aspek-aspek *citizenship education*. Sayang sekali,

penulis belum memperoleh informasi bagaimana model-model pendidikan yang dilakukan oleh Partai maupun organisasi kepemudaannya. Namun, dari pengalaman pengamatan di Indonesia, partai dan organisasi kepemudaan memiliki bentuk-bentuk perkaderan (*training* atau sejenisnya) yang khas untuk selain membangun kelangsungan hidup lembaga, juga melakukan rekrutmen dan regenerasi.

## **F. Penutup**

Dari paparan di muka, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di masing-masing negara memiliki berbagai penamaan yang berbeda-beda dan aspek penekanan yang berbeda pula, sebagai ciri dan karakteristik yang dipengaruhi oleh sistem nilai dan budaya politik (sistem politik) yang dianut suatu negara. Dalam kasus Cina, pendidikan moral menjadi mata pelajaran penting untuk implementasi *civic education* di sekolah.

Aspek politik sangat dominan mempengaruhi model *civic education* di Cina. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan dari sistem politik otoriter Cina di bawah pemerintahan Partai Komunis Cina yang mengedepankan kepatuhan warga negaranya untuk mengusung cita-cita partai tersebut, semenjak berkuasa 1949 hingga sekarang. Hal menarik ialah bahwa meskipun *civic education* sebagai bagian dari pendidikan moral diajarkan secara formal di sekolah, partai dan organisasi kepemudaannya telah berhasil membangun situs-situs kewarganegaraan yang masif.

Sekilas, keberadaan *civic education* di Cina hampir memiliki persamaan-persamaan dengan kondisi yang ada di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru (lihat disertasi Freddy Kirana Kalidjernih, 2005). Jika di masa Orde Baru, *civic education* identik dengan pendidikan moral yang dijabarkan dari tafsir rejim atas Pancasila sebagai ideologi negara, maka di Cina selain menanamkan *status*

quo pemerintah juga menanamkan ideologi Marxisme-Leninisme, Ajaran Mao Zedong dan Teori Deng Xiaping.

\* \* \* \* \*

## DAFTAR PUSTAKA

- An Yunfeng, 2004, "Curriculum Materials Reviews," *Journal of Moral Education*, Vol. 33, No. 4, December 2004: 625-629.
- Freddy Kiran Kalidjernih, 2005, *Post-Colonial Citizenship Education: A Critical Study of the Production and Reproduction of the Indonesian Civic Ideal*, Disertasi Ph.D, University of Tasmania, Australia
- Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004, "Deyu as moral education in modern China: ideological functions and transformations," *Journal of Moral Education*," Vol. 33, No. 4, December, pp. 449-460
- Qi Wanxue and Tang Hanwei, 2004, "The social and cultural background of contemporary moral education in China," *Journal of Moral Education*, Vol. 33, No. 4, December, pp. 465-480
- W. O. Lee, 2006, "Tension and Contentions in the Development of Citizenship Curriculum in Asian Countries," Keynote Address at the CITZED International Conference, Oriel College, Oxford, 25-27 July, 16 pages.
- Wing On Lee dan Chi Hang Ho, 2005, "Ideopolitical Shifts and Changes in Moral Education Policy in China," *Journal of Moral Education*, Vol. 34, No.4, December, pp. 413-431.
- Zhan Wansheng and Ning Wujie, 2004, "The moral education curriculum for junior high schools in 21st century China," *Journal of Moral Education*, Vol. 33, No. 4, December, pp. 511-532
- Zhu Xiaoman dan Liu Cilin, "Teacher training for moral education in China" *Journal of Moral Education*, Vol. 33, No. 4, December 2004, pp. 481-494